

---

## PENYIMPANGAN DALAM MASA DEMOKRASI TERPIMPIN (1959-1965): KEKUASAAN PRESIDEN SOEKARNO YANG TAK TERBATAS

<sup>1</sup> Chanifia Izza Millata, <sup>2</sup> Neneng Sobibatu Rohmah

<sup>1</sup> Ilmu Politik FISIP Universitas Jenderal Soedirman

<sup>2</sup> Ilmu Politik FISIP Universitas Jenderal Soedirman

<sup>1</sup>[chanifia.izza@unsoed.ac.id](mailto:chanifia.izza@unsoed.ac.id) <sup>2</sup>[neneng.sobibatu@unsoed.ac.id](mailto:neneng.sobibatu@unsoed.ac.id)

---

### ABSTRAK

Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji dan menelaah situasi politik yang terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965) khususnya terkait dengan kekuasaan Presiden Soekarno yang tak terbatas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teori yang digunakan adalah teori kekuasaan dan teori kepemimpinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa penyimpangan selama masa Demokrasi Terpimpin, antara lain adanya pembentukan MPRS, kedudukan presiden yang tidak terbatas, pembubaran DPR dan pembentukan DPR-GR, pembentukan DPAS, pembentukan Front Nasional, dll. Sedangkan faktor-faktor penyebab adanya penyimpangan kekuasaan yang terjadi masa Demokrasi Terpimpin antara lain adalah masa kekuasaan presiden yang terbatas pada masa Demokrasi Parlementer dan pemikiran radikal Soekarno yang menganggap bahwa rakyat Indonesia yang sangat beragam harus dipimpin dengan cara pemusatan kepemimpinan agar dapat menyamakan pandangan dan tidak menimbulkan permasalahan dengan adanya perbedaan pendapat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penyimpangan kekuasaan pada masa demokrasi terpimpin bukan secara instan, namun merupakan buah pemikiran Soekarno sejak muda dan demokrasi terpimpin memberikan kesempatan bagi Soekarno untuk merealisasikan pemikirannya yang berujung pada adanya penyimpangan-penyimpangan kekuasaan.

**Kata Kunci;** demokrasi terpimpin, soekarno, penyimpangan kekuasaan

---

### A. PENDAHULUAN

Indonesia dalam sejarah kemerdekaannya memiliki perjalanan yang cukup panjang. Mulai dari awal pemberontakan dari penjajahan Belanda, berebut kekuasaan pada awal kemerdekaan. Kini pun tetap terlihat kalau Indonesia masih terus menyempurnakan konsep ketatanegaraannya. Alur periodisasi sejarah politik di Indonesia pasca kemerdekaan dimulai sejak pemerintahan masa revolusi kemerdekaan, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, orde baru, lalu reformasi yang hingga saat ini kita rasakan dengan berbagai keberhasilan dan hambatannya.

Penelitian ini akan membahas mengenai salah satu fenomena yang terjadi pada salah satu masa sejarah perpolitikan Indonesia, yaitu era demokrasi terpimpin. Fenomena demokrasi terpimpin menarik untuk dianalisis karena adanya dinamika pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soekarno dahulu. Peran Soekarno dalam perjuangan sejak masa penjajahan hingga berhasil membawa Indonesia menuju kemerdekaan sudah tidak diragukan. Di tengah krisis tahun 1957, diambil langkah langkah pertama menuju suatu bentuk pemerintahan yang disebut Soekarno "Demokrasi Terpimpin". Bentuk pemerintahan ini merupakan suatu sistem yang tidak tetap, yang dilahirkan dari krisis dan terus menerus berubah-ubah sepanjang salah satu masa paling kacau dalam sejarah Indonesia. Demokrasi terpimpin didominasi oleh kepribadian Soekarno, walaupun prakarsa pelaksanaannya dia ambil secara bersama dengan pimpinan angkatan bersenjata. Konsep Demokrasi Terpimpin Soekarno yang diawali dengan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, banyak memiliki nilai-nilai yang bertolak belakang dengan UUD 45 pada perjalanannya. Keberhasilan diberlakukannya Dekrit Presiden tidak bisa dilepaskan dari dukungan politik dari partai-partai besar seperti PNI dan PKI serta yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan militer yang dalam hal ini dukungan dari KASAD Jenderal Abdul Haris Nasution (Sedana Arta, 2022). Cita-cita Sukarno untuk menyatukan tiga ideologi (Nasionalis, Agama dan Komunis) dapat direalisasikan pada masa Demokrasi Terpimpin, walaupun ide tersebut sudah dimiliki ketika masa pergerakan nasional (Suganda, 2015).

Beberapa penyimpangan dalam masa itu terjadi, seperti pembubaran DPR hasil pemilu 1955 pada 5 Maret 1960 dengan alasan parlemen menolak RAPBN. Kemudian dibentuk DPRGR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong) pada 24 Juni 1960, serta penetapan MANIPOL USDEK sebagai GBHN (Garis Besar Haluan Negara) lewat Tap MPRS No. 1/MPRS/1960. Pembubaran Dewan Konstituante pun terlihat tidak lazim, padahal Dewan Konstituante sudah menjalankan tugasnya kurang lebih 90% dan kesepakatan kembali pada UUD 1945 juga telah disepakati. Turunnya Dekrit Presiden selain keinginan Soekarno dengan konsepsinya, juga mengulang tema lama yaitu "revolusi belum selesai" serta menganggap Dewan Konstituante gagal. Dari penyimpangan-penyimpangan ini menunjukkan kekuasaan presiden pada masa itu tidaklah terbatas. Konstitusi seakan-akan tidak lagi mampu membatasi

kekuasaan Soekarno pada masa itu. Dalam tulisan ini, akan dibahas lebih lanjut mengenai bagaimana jalannya demokrasi terpimpin pada masa itu yang akhirnya memberikan ruang berlebih kepada Presiden Soekarno untuk menjadi pusat segala kekuasaan dan kepemimpinan. Selain itu, akan dijelaskan pula mengenai latar belakang apa yang kemudian membuat Soekarno begitu berambisi dalam masa demokrasi terpimpin.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; 1) Bagaimana penyimpangan kekuasaan Presiden Soekarno pada masa demokrasi terpimpin (1959-1965)?; 2) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya penyimpangan kekuasaan Presiden Soekarno pada masa demokrasi terpimpin (1959-1965)?

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Tipe penelitian deskriptif digunakan karena mampu menggambarkan permasalahan terkait penyimpangan selama masa Demokrasi Terpimpin. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka atau kajian literatur. Studi Pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan mempelajari berbagai data, artikel, arsip dokumen, dan buku-buku literatur serta penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan permasalahan. Dalam penelitian ini, Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan pustaka yang didapat dari berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, berita di media yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Teori Kekuasaan dan Kepemimpinan**

Salah satu konsep penting dan sering dibahas dalam politik adalah mengenai kekuasaan. Banyak ilmuwan yang mendefinisikan arti kekuasaan. Salah satunya definisi yang menyatakan bahwa kekuasaan dianggap sebagai kemampuan pelaku untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku pelaku terakhir menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan (Budiardjo, 1991). Pelaku yang dimaksud di sini dapat merupakan individu

maupun kolektif. Contoh mudah untuk memahami hubungan dalam kekuasaan adalah ketika A mempunyai kekuasaan atas B jika A dapat menyebabkan B bertindak sesuai keinginan A. Dalam kekuasaan terdapat kemampuan untuk memberikan sanksi kepada pihak yang tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh pihak lainnya. Sedangkan apabila dalam suatu hubungan pihak pertama tidak dapat memberikan sanksi terhadap pihak lainnya, berarti hal tersebut bukanlah kekuasaan, melainkan disebut dengan pengaruh. Sumber-sumber kekuasaan dapat berupa kedudukan, kekayaan, kepercayaan atau agama, hubungan kerabat, atau kepandaian dan keterampilan. Cara menyelenggarakan kekuasaan dapat melalui kekerasan dan persuasi. Dua hal yang berkaitan dengan kekuasaan adalah adanya wewenang/otoritas dan legitimasi/keabsahan. Dengan memiliki otoritas dan legitimasi, kekuasaan seseorang akan bersifat formal dan mengikat.

Sumber-sumber kekuasaan seperti yang disampaikan di atas dimanfaatkan oleh pihak berkuasa sebagai cara untuk mengikat pihak yang lebih kecil dari mereka, suka atau pun tidak. Dengan begitu, pihak pemilik kekuasaan cenderung memiliki kekuasaan yang tak terbatas karena sumber-sumber kekuasaan yang dimilikinya. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Lord Acton bahwa kekuasaan cenderung untuk menjadi korup, dan kekuasaan mutlak menjadi korup secara mutlak pula (Budiardjo, 1991). Kekuasaan yang tanpa batas tentu akan dapat disalahgunakan oleh si penguasa apabila tidak ada pihak yang mengawasi. Dalam kehidupan politik hal ini tentu sudah tidak asing. Politik, pada dasarnya, adalah kekuasaan: kemampuan untuk mencapai hasil yang diinginkan, apapun caranya (Andrew Heywood, 2002). Tentunya akan berakibat fatal ketika penguasa negara dapat melakukan berbagai cara untuk memperoleh apa yang diinginkan dan memiliki kekuasaan yang mutlak tanpa pengawasan. Apabila konteksnya negara, maka akan muncul yang namanya negara kekuasaan. Keadaan ini tentu akan berpeluang mengesampingkan hak individu di dalamnya dan menciptakan negara yang totaliter. Untuk itu, memerlukan konstitusi yang sesuai dengan suara hati rakyat sebagai pembatas kekuasaan negara. Kekuasaan menjadi salah satu sarana dalam kepemimpinan. Hal ini dikarenakan kepemimpinan membutuhkan suatu sarana untuk bisa mengefektifkan kepemimpinannya (Thoha, 2014).

Pemimpin formal memperoleh kekuasaan atau otoritas dari posisi atau jabatan yang berhak mengangkatnya sebagai kepala, deputi, atau sebutan formal lainnya (Thoha, 2014). Sedangkan pada pemimpin informal, kekuasaan berubah menjadi pengaruh. Sangat penting melihat kualitas pribadi seorang calon pemimpin sebelum diangkat menjadi pemimpin yang sesungguhnya. Hal ini sangat berpengaruh kepada bagaimana cara ia akan memimpin kelak. Sekarang kita lihat dalam praktik kepemimpinan formal kepala daerah atau menteri, begitu dia memegang jabatan formalnya maka kekuasaan sudah melekat pada jabatan dan perilakunya (Thoha, 2014).

Dalam kaitannya dengan kekuasaan dan kepemimpinan Presiden Soekarno pada masa demokrasi terpimpin, nantinya akan diketahui apakah Presiden Soekarno dalam menggunakan kekuasaannya dengan sumber-sumber kekuasaan yang dimiliki sesuai kapasitasnya sebagai seorang pemimpin negara (presiden) atau melebihi kapasitasnya sebagai presiden.

### **Penyimpangan Kekuasaan Presiden Soekarno Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)**

Demokrasi terpimpin merupakan reaksi dari demokrasi parlementer atau demokrasi liberal yang dianggap tidak cocok diterapkan di Indonesia karena mengandung nilai-nilai Barat yang tidak sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Demokrasi terpimpin, juga disebut demokrasi terkelola, adalah istilah untuk sebuah pemerintahan demokrasi dengan peningkatan otokrasi. Pemerintahan negara dilegitimasi oleh pemilihan umum yang walaupun bebas dan adil, digunakan oleh pemerintah untuk melanjutkan kebijakan dan tujuan yang sama. Dengan kata lain, pemerintah telah belajar untuk mengendalikan pemilihan umum sehingga pemilih dapat melaksanakan semua hak-hak mereka tanpa benar-benar mengubah kebijakan publik. Walaupun mengikuti prinsip-prinsip dasar demokrasi, dapat timbul penyimpangan kecil terhadap otoritarianisme. Dalam demokrasi terpimpin, pemilih dicegah untuk memiliki dampak yang signifikan terhadap kebijakan yang dijalankan oleh negara melalui pengefektifan teknik kinerja humas yang berkelanjutan. Seperti yang telah disampaikan pada pendahuluan, demokrasi terpimpin dimulai dari keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 karena situasi politik pada waktu itu sangat mengkhawatirkan. Dekrit 5 Juli dapat dipandang sebagai suatu usaha untuk mencari

jalan keluar dari kemacetan politik melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat (Budiardjo, 2008). Konstituante hasil Pemilu 1955 dibubarkan, peran patai politik yang selama ini telah menggelar sistem Kabinet Parlemerter tidak lagi bisa dijalankan (Thoha, 2014).

Dalam UUD 1945 menentukan bahwa seorang presiden bertahan sekurang-kurangnya lima tahun dan memungkinkan presiden untuk dipilih kembali. Akan tetapi, Ketetapan MPRS No. III/1963 mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Hal ini tentu bertentangan dengan UUD 1945. Dari sinilah awal penyimpangan dalam demokrasi terpimpin dimulai. Penentuan sebagai presiden seumur hidup semakin membuka peluang Presiden Soekarno untuk memusatkan segala kekuasaan padanya. Setelah itu, masih terdapat beberapa hal yang dianggap sebagai penyimpangan kekuasaan Presiden Soekarno pada masa demokrasi terpimpin, yaitu:

### **Pembentukan MPRS**

Presiden membentuk MPRS berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959. Tindakan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 karena Berdasarkan UUD 1945 pengangkatan anggota MPRS sebagai lembaga tertinggi negara harus melalui pemilihan umum sehingga partai-partai yang terpilih oleh rakyat memiliki anggota-anggota yang duduk di MPR. Anggota MPRS ditunjuk dan diangkat oleh Presiden dengan syarat bahwa MPRS setuju untuk kembali kepada UUD 1945, setia kepada perjuangan Republik Indonesia, dan setuju pada manifesto Politik. Keanggotaan MPRS terdiri dari 61 orang anggota DPR, 94 orang utusan daerah, dan 200 orang wakil golongan. Tugas MPRS terbatas pada menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Menurut Amanat Presiden Soekarno, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara sama seperti lembaga-lembaga negara lainnya, adalah alat revolusi untuk melaksanakan Amanat Penderitaan Rakyat membangun suatu masyarakat adil dan makmur, suatu hidup merdeka, suatu hidup internasional yang bersahabat dan damai dengan semua bangsa (Tumakaka, 1998).

### **Kedudukan Presiden**

Kedudukan Presiden yang berdasarkan UUD 1945 seharusnya berada di bawah MPR, justru pada masa demokrasi terpimpin MPRS lah yang tunduk pada Presiden Soekarno. Hal tersebut tampak dengan adanya tindakan presiden untuk mengangkat Ketua MPRS dirangkap oleh Wakil Perdana Menteri III serta

pengangkatan wakil ketua MPRS yang dipilih dan dipimpin oleh partai-partai besar serta wakil ABRI yang masing-masing berkedudukan sebagai menteri yang tidak memimpin departemen.

### **Pembubaran DPR dan Pembentukan DPR-GR**

Setelah itu, hal yang jelas-jelas bertentangan dari UUD 1945 selanjutnya adalah Presiden Soekarno membubarkan parlemen. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil pemilu tahun 1955 dibubarkan karena DPR menolak RAPBN tahun 1960 yang diajukan pemerintah. Presiden selanjutnya menyatakan pembubaran DPR dan sebagai gantinya presiden membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR). Di mana semua anggotanya ditunjuk oleh Presiden. Peraturan DPR-GR juga ditentukan oleh presiden. Sehingga DPR-GR harus mengikuti kehendak serta kebijakan pemerintah. Tugas DPR-GR adalah sebagai berikut: 1) Melaksanakan manifesto politik; 2) Mewujudkan amanat penderitaan rakyat; dan 3) Melaksanakan

### **Demokrasi Terpimpin**

#### **Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara**

Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No.3 tahun 1959. DPAS sudah disusun mendahului MPRS (Tumakaka, 1998). Lembaga ini diketuai oleh Presiden sendiri. Keanggotaan DPAS terdiri atas satu orang wakil ketua, 12 orang wakil partai politik, 8 orang utusan daerah, dan 24 orang wakil golongan. Tugas DPAS adalah memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan mengajukan usul kepada pemerintah. Kedudukan DPAS juga berada dibawah pemerintah/presiden sebab presiden adalah ketuanya. Hal ini disebabkan karena DPAS yang mengusulkan dengan suara bulat agar pidato presiden pada hari kemerdekaan RI 17 AGUSTUS 1959 yang berjudul "Penemuan Kembali Revolusi Kita" yang dikenal dengan Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol) ditetapkan sebagai GBHN berdasarkan Penpres No.1 tahun 1960. Inti Manipol adalah USDEK (Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia). Sehingga lebih dikenal dengan MANIPOL USDEK.

### **Pembentukan Front Nasional**

Front Nasional dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No.13 Tahun 1959. Front Nasional merupakan sebuah organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita

proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam UUD 1945. Front Nasional ini, yang dimaksudkan untuk mencakup golongan-golongan Nasionalis, Agama, dan Komunis, diberi nama “NASAKOM” sebagai singkatan nama ketiga golongan itu (Dahm, 1987). Tiga kekuatan partai politik Nasakom berambisi menggunakan jabatan birokrasi dalam lembaga pemerintah sebagai building block untuk kepentingan membangun organisasi partainya (Thoha, 2014). Penyatuan segala bentuk potensi nasional ini diharapkan dapat menjadi kekuatan untuk menyukseskan pembangunan. Front Nasional dipimpin oleh Presiden Soekarno sendiri. Gerakan tunggal yang mencakup semua aliran ini merupakan impian lamanya yang dapat terealisasikan di masa demokrasi terpimpin. Tugas front nasional adalah sebagai berikut.

- Menyelesaikan Revolusi Nasional
- Melaksanakan Pembangunan
- Mengembalikan Irian Barat

### **Pembentukan Kabinet Kerja**

Tanggal 9 Juli 1959, presiden membentuk kabinet Kerja. Sebagai wakil presiden diangkatlah Ir. Juanda. Pada masa ini ada sebutan Menteri Kabinet inti, menteri negara ex-officio bukan anggota kabinet tetapi bisa menghadiri sidang kabinet. Jabatan ini disandang oleh semua Kepala Staf Angkatan, Jaksa Agung, Wakil Ketua DPA, dan Ketua Dewan Perancang Nasional (Thoha, 2014). Hingga tahun 1964 Kabinet Kerja mengalami tiga kali perombakan (reshuffle). Program kabinet ini adalah sebagai berikut; 1) Mencukupi kebutuhan sandang pangan; 2) Menciptakan keamanan negara; dan 3) Mengembalikan Irian Barat.

### **Keterlibatan PKI dalam Ajaran Nasakom**

Perbedaan ideologi dari partai-partai yang berkembang masa demokrasi parlementer menimbulkan perbedaan pemahaman mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdampak pada terancamnya persatuan di Indonesia. Pada masa demokrasi terpimpin pemerintah mengambil langkah untuk menyamakan pemahaman mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menyampaikan ajaran Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis). Tujuannya untuk menggalang persatuan bangsa.

Bagi presiden Nasakom merupakan cerminan paham berbagai golongan dalam masyarakat. Presiden yakin bahwa dengan menerima dan melaksanakan

Nasakom maka persatuan Indonesia akan terwujud. Ajaran Nasakom mulai disebarkan pada masyarakat. Dikeluarkan ajaran Nasakom sama saja dengan upaya untuk memperkuat kedudukan Presiden sebab jika menolak Nasakom sama saja dengan menolak presiden.

Kelompok yang kritis terhadap ajaran Nasakom adalah kalangan cendekiawan dan ABRI. Upaya penyebarluasan ajaran Nasakom dimanfaatkan oleh PKI dengan mengemukakan bahwa PKI merupakan barisan terdepan pembela Nasakom. Keterlibatan PKI tersebut menyebabkan ajaran Nasakom menyimpang dari ajaran kehidupan berbangsa dan bernegara serta mengeser kedudukan Pancasila dan UUD 1945 menjadi komunis. Selain itu PKI mengambil alih kedudukan dan kekuasaan pemerintahan yang sah. PKI berhasil meyakinkan presiden bahwa Presiden Soukarno tanpa PKI akan menjadi lemah terhadap TNI.

### **Adanya ajaran RESOPIM**

Tujuan adanya ajaran RESOPIM (Revolusi, Sosialisme Indonesia, dan Pimpinan Nasional) adalah untuk memperkuat kedudukan Presiden Sukarno. Ajaran Resopim diumumkan pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-16. Inti dari ajaran ini adalah bahwa seluruh unsur kehidupan berbangsa dan bernegara harus dicapai melalui revolusi, dijiwai oleh sosialisme, dan dikendalikan oleh satu pimpinan nasional yang disebut Panglima Besar Revolusi (PBR), yaitu Presiden Sukarno. Dampak dari sosialisasi Resopim ini maka kedudukan lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara ditetapkan dibawah presiden. Hal ini terlihat dengan adanya pemberian pangkat menteri kepada pimpinan lembaga tersebut, padahal kedudukan menteri seharusnya sebagai pembantu presiden.

### **Angkatan Bersenjata Republik Indonesia**

TNI dan Polri disatukan menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang terdiri atas 4 angkatan, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, dan Angkatan Kepolisian. Masing-masing angkatan dipimpin oleh Menteri Panglima Angkatan yang kedudukannya langsung berada di bawah presiden. ABRI menjadi salah satu golongan fungsional dan kekuatan sosial politik Indonesia. Instabilitas politik yang terjadi pada masa demokrasi parlementer karena parpol gagal menyelenggarakan pemerintahan mendorong militer untuk turut

bertindak. Oleh karena itu, pada saat ini lali tampil kekuatan militer dalam panggung politik pemerintahan kita (Thoha, 2014).

### **Penataan Kehidupan Partai Politik**

Pada masa demokrasi Parleментар, partai dapat melakukan kegiatan politik secara leluasa. Sedangkan pada masa demokrasi terpimpin, kedudukan partai dibatasi oleh penetapan presiden No. 7 tahun 1959. Partai yang tidak memenuhi syarat, misalnya jumlah anggota yang terlalu sedikit akan dibubarkan sehingga dari 28 partai yang ada hanya tinggal 11 partai. Tindakan pemerintah ini dikenal dengan penyederhanaan kepartaian. Pembatasan gerak-gerik partai semakin memperkuat kedudukan pemerintah terutama presiden. Kedudukan presiden yang kuat tersebut tampak dengan tindakannya untuk membubarkan 2 partai politik yang pernah berjaya masa demokrasi Parleментар, yaitu Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI). Alasan pembubaran partai tersebut adalah karena sejumlah anggota dari kedua partai tersebut terlibat dalam pemberontakan PRRI dan Permesta. Kedua Partai tersebut resmi dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1960. Kehadiran partai-partai politik, bukan untuk mempersiapkan diri dalam kerangka kontestasi politik untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan (karena Pemilihan Umum tidak pernah dijalankan), tetapi lebih merupakan elemen penopang dari tarik tambang antara Presiden Soekarno, Angkatan Darat, dan Partai Komunis Indonesia (Gaffar, 2006).

### **Arah Politik Luar Negeri**

#### **Politik Konfrontasi Nefo dan Oldefo**

Terjadi penyimpangan dari politik luar negeri bebas aktif yang menjadi cenderung condong pada salah satu poros. Saat itu Indonesia memberlakukan politik konfrontasi yang lebih mengarah pada negara-negara kapitalis seperti negara Eropa Barat dan Amerika Serikat. Politik Konfrontasi tersebut dilandasi oleh pandangan tentang Nefo (New Emerging Forces) dan Oldefo (Old Established Forces). Nefo merupakan kekuatan baru yang sedang muncul yaitu negara-negara progresif revolusioner (termasuk Indonesia dan negara-negara komunis umumnya) yang anti imperialisme dan kolonialisme. Oldefo merupakan kekuatan lama yang telah mapan yakni negara-negara kapitalis yang neokolonialis dan imperialis (Nekolim). Untuk mewujudkan Nefo maka dibentuk poros Jakarta-Phnom Penh-Hanoi-Peking-Pyong

Yang. Dampaknya ruang gerak Indonesia di forum internasional menjadi sempit sebab hanya berpedoman ke negara-negara komunis.

### **Politik Konfrontasi Malaysia**

Indonesia juga menjalankan politik konfrontasi dengan Malaysia. Hal ini disebabkan karena pemerintah tidak setuju dengan pembentukan negara federasi Malaysia yang dianggap sebagai proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan Indonesia dan negara-negara blok Nefo. Dalam rangka konfrontasi tersebut Presiden mengumumkan Dwi Komando Rakyat (Dwikora) pada tanggal 3 Mei 1964, yang isinya sebagai berikut:

- Perhebat Ketahanan Revolusi Indonesia.
- Bantu perjuangan rakyat Malaysia untuk membebaskan diri dari Nekolim Inggris.
- Pelaksanaan Dwikora dengan mengirimkan sukarelawan ke Malaysia Timur dan Barat menunjukkan adanya campur tangan Indonesia pada masalah dalam negeri Malaysia.

### **Politik Mercusuar**

Politik Mercusuar dijalankan oleh presiden sebab beliau menganggap bahwa Indonesia merupakan mercusuar yang dapat menerangi jalan bagi Nefo di seluruh dunia. Untuk mewujudkannya maka diselenggarakan proyek-proyek besar dan spektakuler yang diharapkan dapat menempatkan Indonesia pada kedudukan yang terkemuka di kalangan Nefo. Proyek-proyek tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar mencapai milyaran rupiah diantaranya diselenggarakannya GANEFO (Games of the New Emerging Forces) yang membutuhkan pembangunan kompleks Olahraga Senayan serta biaya perjalanan bagi delegasi asing. Pada tanggal 7 Januari 1965, Indonesia keluar dari keanggotaan PBB sebab Malaysia diangkat menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

### **Politik Gerakan Non-Blok**

Gerakan Non-Blok merupakan gerakan persaudaraan negara-negara Asia-Afrika yang kehidupan politiknya tidak terpengaruh oleh Blok Barat maupun Blok Timur. Selanjutnya gerakan ini memusatkan perjuangannya pada gerakan kemerdekaan bangsa-bangsa Asia-Afrika dan mencegah perluasan Perang Dingin. Keterlibatan Indonesia dalam GNB menunjukkan bahwa kehidupan politik Indonesia di dunia sudah cukup maju. GNB merupakan gerakan yang bebas mendukung

perdamaian dunia dan kemanusiaan. Bagi RI, GNB merupakan pancaran dan revitalisasi dari UUD1945 baik dalam skala nasional dan internasional. Besarnya kekuasaan Presiden dalam Pelaksanaan demokrasi terpimpin tampak dengan:

- a. Pengangkatan Ketua MPRS dirangkap oleh Wakil Perdana Menteri III serta pengangkatan wakil ketua MPRS yang dipilih dan dipimpin oleh partai-partai besar serta wakil ABRI yang masing-masing berkedudukan sebagai menteri yang tidak memimpin departemen.
- b. Pidato presiden yang berjudul "Penemuan Kembali Revolusi Kita" pada tanggal 17 Agustus 1959 yang dikenal dengan Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol) ditetapkan sebagai GBHN atas usul DPA yang bersidang tanggal 23-25 September 1959.
- c. Inti Manipol adalah USDEK (Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia). Sehingga lebih dikenal dengan MANIPOL USDEK.
- d. Pengangkatan Ir. Soekarno sebagai Pemimpin Besar Revolusi yang berarti sebagai presiden seumur hidup.
- e. Pidato presiden yang berjudul "Berdiri di atas Kaki Sendiri" sebagai pedoman revolusi dan politik luar negeri.
- f. Presiden berusaha menciptakan kondisi persaingan di antara angkatan, persaingan di antara TNI dengan Parpol.
- g. Presiden mengambil alih pemimpin tertinggi Angkatan Bersenjata dengan di bentuk Komandan Operasi Tertinggi (KOTI).

### **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyimpangan Kekuasaan Presiden Soekarno Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)**

Penyimpangan kekuasaan yang dilakukan Soekarno dalam masa demokrasi terpimpin tidak terjadi begitu saja, namun merupakan reaksi dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya. Beberapa peristiwa yang melatarbelakangi tersebut diantaranya adalah:

#### **Kekuasaan Presiden yang Terbatas pada Masa Demokrasi Parlementer**

Demokrasi parlementer merupakan masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hampir semua elemen demokrasi dapat kita temukan dalam perwujudannya dalam kehidupan politik di Indonesia (Gaffar, 2006). Namun, pada masa ini juga lah

kekuasaan Soekarno sebagai presiden sangatlah terbatas. Presiden hanya sebagai kepala negara. Sesuai dengan namanya, pada masa ini parlementerlah yang berkuasa, parpol-parpol berkembang dengan sangat pesat. Yang kuat adalah partai; Angkatan Bersenjata dan Presiden Sukarno relatif lemah, dan hak serta kebebasan warga jarang benar dilanggar (Herbert Feith, 1995). Legislatif berlandaskan liberalisme dan individualisme. Perbedaan bagi Soekarno haruslah disatukan dalam satu wadah, namun hal tersebut tidak dapat diciptakan dalam masa demokrasi parlementer di mana semua perbedaan dibiarkan tumbuh.

Awal demokrasi parlementer pemerintahan di bawah kepemimpinan Hatta dan beberapa pemimpin moderat di sekelilingnya yang “pro Barat” cenderung menganggap bahwa revolusi telah usai dengan tercapainya kemerdekaan Indonesia. Hal ini sangat bertentangan dengan pemikiran Soekarno yang menganggap bahwa militansi nasionalis dan revolusi masih harus tetap berjalan. Bagi Soekarno, perjuangan sebelum kemerdekaan adalah untuk mencapai kemerdekaan, namun setelah kemerdekaan revolusi dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan. Namun, pada masa ini Soekarno benar-benar kehilangan kekuasaannya. Demokrasi parlementer melemahkan kedudukan Presiden Soekarno.

Pada tahun ini pula pemilu pertama di Indonesia diselenggarakan dengan sangat demokratis. Diharapkan sekali pada saat itu baha pemilihan umum 1955 akan dapat membentuk kembali demokrasi di Indonesia, tetapi kenyataannya setelah pemilihan umum pemerintahan tetap lemah dan tidak stabil seperti sebelumnya (Herbert Feith, 1995). Hal ini akhirnya semakin membawa demokrasi parlementer menuju kejatuhannya dengan puncaknya Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 1959 yang membawa Indonesia menuju demorkasi terpimpin. Pada masa inilah akhirnya semakin membawa Soekarno untuk dapat kembali menjadi pusat segala kekuasaan seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan di atas.

### **Pemikiran Radikal Soekarno**

Apa yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin tidak lepas dari karakter pemikiran Soekarno sejak masih muda. Sejak masa mudanya, Soekarno merupakan pemuda yang memiliki ketertarikan yang teramat besar pada dunia politik. Tak lebih karena ia melihat rakyatnya pada masa itu yang mengalami penderitaan karena penjajahan Belanda. Sejak muda ia tinggal di rumah H. O. S. Tjokroaminoto, di sana

ia mulai belajar politik bersama Alimin dan Muso yang pada saat itu mereka masih berjuang bersama di Sarekat Islam. Soekarno menjadikan Tjokroaminoto sebagai panutan utamanya (selain Alimin dan Muso yang pada kemudian hari menjadi musuh politiknya) dan memandang politik hanya semata-mata dari segi Islam. Namun, pemikirannya mulai berubah ketika ia semakin dewasa dan semakin matang pemikiran politiknya. Soekarno mulai memiliki pandangan-pandangannya sendiri mengenai apa yang seharusnya dilakukan rakyat Indonesia. Bagi Soekarno, gotong royong dan kekeluargaan adalah ciri khas bangsa Indonesia yang tidak dapat digantikan meskipun sudah berabad-abad dijajah Belanda. Ajarannya yang kemudian dikenal dengan Marhaenisme baginya merupakan Sosialisme Indonesia dalam praktek. Soekarno mengaku sebagai seorang yang sosialis, dan juga demokratis pada saat bersamaan. Soekarno kerap membakar semangat rakyat Indonesia melalui pidato-pidatonya yang memang dalam hal tersebut ia memiliki kemampuan untuk menggugah hati para pendengarnya. Pemikirannya radikal, revolusioner, dan cenderung bertindak tanpa rasa takut demi mensejajarkan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain.

Soekarno menganggap bahwa rakyat Indonesia yang sangat beragam harus dipimpin dengan cara pemusatan kepemimpinan agar lebih dapat menyamakan pandangan dan tidak menimbulkan permasalahan dengan adanya perbedaan pendapat. Namun, ketika Indonesia sudah mencapai kemerdekaan, Soekarno harus memendam pemikirannya ini karena posisinya yang hanya sebagai kepala negara tidak memberi ruang kepada Soekarno untuk melakukan pemusatan kepemimpinan. Sehingga, ketika memasuki era demokrasi terpimpin, Soekarno mulai mengaplikasikan apa yang menjadi kehendak pemikirannya selama ini, pemikiran yang ia susun sejak masih muda dengan menjadi pusat segala kepemimpinan.

Pada pemilu pertama tahun 1955, peserta pemilu yang mencapai 150 parpol menghasilkan empat parpol besar, yaitu Masyumi (56 suara), PNI (56 suara), NU (46 suara), dan PKI (36 suara). Namun, seperti yang sudah disampaikan di atas, yang dihasilkan dari pemilu ini adalah jatuh banggunya kabinet karena tidak adanya suara mayoritas. Parlemen menggunakan mosi tidak percayanya untuk menjatuhkan kabinet karena dianggap tidak sesuai dengan tuntutan parpol. Sejak berakhirnya Pemilihan Umum 1955, Presiden Soekarno sudah menunjukkan gejala

ketidaksenangannya kepada partai-partai politik (Gaffar, 2006). Parpol dianggap lebih berorientasi pada kepentingan ideologinya sendiri daripada pada kepentingan politik nasional. Soekarno menganggap bahwa keputusan dikeluarkannya Maklumat Wapres No. X tahun 1945 untuk menganjurkan dibuatnya partai politik merupakan suatu kesalahan besar. Bahkan, pada tahun 1956, dalam pidatonya Soekarno menyampaikan gagasannya untuk membubarkan parpol.

Demokrasi parlementer dianggap tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, seperti yang disampaikan dalam pidatonya pada tanggal 21 Februari 1957: Dan oleh karena demokrasi ini adalah demokrasi impor, bukan demokrasi Indonesia, bukan demokrasi yang cocok dengan jiwa kita sendiri, maka kita mengalami segenap ekses-ekses daripada sekadar memakai barang impor. Segenap ekses-ekses daripada penyelenggaraan demokrasi yang bukan demokrasi yang sesuai dengan kepribadian kita sendiri. Di dalam demokrasi Barat itu Saudara-saudara, demokrasi parlementer ala Barat, maka adalah begrip – yang dinamakan begrip oposisi inilah Saudara-saudara yang telah membuat kita sebelas tahun lamanya menderita. Oleh karena begrip oposisi ini kita maknakan dan kita artikan dengan jalan yang tidak cocok dengan jiwa Indonesia (Herbert Feith, 1995).

Dari sejak sebelum pemilu 1955, Soekarno mulai mencari dukungan untuk meruntuhkan demokrasi parlementer. Ia baru saja mulai mencari sekutu di antara partai-partai yang sependapat dengannya, bahwa revolusi Indonesia masih belum selesai, dan telah memperoleh respons dari PKI yang telah disusun kembali, dari Murba dan PNI (Dahm, 1987). Dari sinilah PKI dibukakan pintu oleh Soekarno secara lebar untuk memperkuat basis politiknya di Indonesia. Setelah pemilu 1955, yang ternyata kubu Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang berpaham liberal tidak memperoleh suara yang berarti dalam pemilu dibandingkan dengan PKI, semakin memberikan peluang pada Soekarno. Soekarno dengan dukungan PKI semakin terang-terangan menyerang demokrasi parlementer sebagaimana yang telah ia lakukan beberapa puluh tahun sebelumnya (Dahm, 1987). Soekarno memunculkan sebuah konsepsi di mana di dalam terdapat dua hal penting, yaitu pembentukan Dewan Nasional dan Kabinet Gotong Royong. Dewan Nasional berisikan anggota dari Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), Angkatan Udara (AU), dan kepolisian. Dari sinilah militer berpikir untuk memasuki dunia politik yang pada masa demokrasi

terpimpin menjadi kenyataan. Sebenarnya Dewan Nasional mendapat tantangan dari beberapa pihak. Penentang Konsepsi Presiden menyatakan, bahwa pembentukan Dewan Nasional merupakan pelanggaran yang sangat fundamental terhadap konstitusi negara, karena lembaga tersebut tidak dikenal dalam konstitusi (Gaffar, 2006).

Tugas Dewan Nasional adalah untuk memberikan masukan kepada kabinet diminta ataupun tidak diminta. Semua kebijakan kabinet harus disetujui oleh Dewan Nasional. Sejak pembentukan Dewan Nasional inilah pemikiran radikal Soekarno kembali terlihat setelah semenjak kemerdekaan 1945 mulai terlihat surut. Soekarno secara tidak langsung telah berhasil melemahkan parpol. Dengan dukungan militer juga akhirnya Soekarno mampu mengeluarkan Dekrit Presiden 1959 sebagai pertanda runtuhnya demokrasi parlementer. Terbukanya pintu lebar untuk kembali membentuk negara yang diinginkan sesuai dengan pemikiran Soekarno membuat Soekarno terus menggunakan kesempatan yang ada pada masa demokrasi terpimpin. Meskipun ternyata dalam prakteknya pemikiran radikal Soekarno melewati batas bahkan bertentangan dengan UUD 1945.

Beberapa hal tersebut menjadi faktor utama yang menyebabkan Soekarno menggunakan kekuasaannya secara tak terbatas dalam masa demokrasi terpimpin. Pemikirannya yang radikal sejak masih muda mulai meredup setelah kemerdekaan 1945 karena pada masa parlementer ia hanya sebatas sebagai Kepala Negara tanpa kekuasaan yang lebih. Namun, setelah demokrasi parlementer berakhir, Soekarno kembali muncul dengan gagasan-gagasannya yang radikal dan demokrasi terpimpin memberikan ruang kepada Soekarno untuk melakukan hal tersebut tanpa ada yang mampu untuk mengontrolnya. Sehingga yang terjadi adalah penyimpangan kekuasaan, bahkan menyimpang dari UUD 1945.

## ANALISIS

Pada era demokrasi terpimpin Soekarno menjalankan kepemimpinannya yang cenderung berperan sebagai diktator diselingi dengan adanya tarik menarik kekuasaan antara Soekarno – TNI – PKI. Hubungan TNI dan PKI terus mengalami pergolakan karena berbeda pandangan. Namun, Soekarno memang cenderung menunjukkan keberpihakannya terhadap PKI meskipun ia keberatan apabila dikatakan sebagai seorang komunis. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa

pembentukan Dewan Nasional yang kontroversial pada saat itu dapat Soekarno lakukan karena mendapat dukungan kuat dari militer. Apalagi melihat kedudukan Soekarno yang hanya sebatas sebagai Kepala Negara pada masa demokrasi parlementer sepertinya tidak memungkinkan untuk Soekarno membentuk sebuah lembaga yang kedudukannya berada di atas kabinet. Dengan dukungan dari TNI dan PKI ini Soekarno semakin mampu untuk mengondisikan perpolitikan Indonesia pada awalnya. Meskipun akhirnya kepemimpinan Soekarno dijatuhkan.

Demokrasi terpimpin memberikan kesempatan bagi Presiden Soekarno untuk merealisasikan gagasan-gagasan radikalnya yang memang sudah dimiliki sejak muda. Bagi Soekarno, perbedaan-perbedaan dalam masyarakat harus disatukan melalui pemerintahan yang terpusat. Penyatuan tiga kekuatan (Nasionalis, Agama, dan Komunis) merupakan wujud penyatuan perbedaan yang Soekarno maksud. Hal ini semata-mata dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan untuk memperkokoh kesatuan dan persatuan sehingga politik Barat yang tidak sesuai dengan latar belakang bangsa Indonesia mampu dihindari. Selain itu, seperti yang sudah disebutkan bahwa dukungan dari militer dan PKI pada masa demokrasi terpimpin membuat semakin besarnya peluang Soekarno untuk menguasai pemerintahan. Parpol-parpol dilemahkan dan semua kekuasaan berpusat pada Presiden Soekarno. Hal ini semakin membuat kekuasaan Soekarno tidak terbatas. Soekarno telah membuktikan bahwa kebebasan liberal ala Barat telah membawa ketidakstabilan politik di Indonesia. Parpol-parpol saling mengkampanyekan ideologinya masing-masing dan mengesampingkan kepentingan nasional.

Pemikiran radikal Soekarno yang sempat terpendam pasca kemerdekaan 1945 apabila diamati mulai terlihat kembali pada saat ia mencetuskan Konsepsi Presiden yang di dalamnya berisis pembentukan Dewan Nasional dan Kabinet Gotong Royong. Selain dua hal tersebut, pembentukan DPA, MPRS dll yang sudah disebutkan di atas menunjukkan Soekarno menggunakan kekuasaan dalam kepemimpinannya sebagai langkah-langkah untuk mewujudkan gagasan-gagasan radikalnya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Namun, ternyata pada praktiknya justru kediktatoran Soekarno membawa banyak pihak untuk mengkritiknya karena penyimpangan-penyimpangan konstitusi yang dilakukan.

Hal-hal di atas menunjukkan Presiden Soekarno memiliki sumber-sumber kekuasaan sesuai yang disebutkan dalam teori kekuasaan, yaitu berupa kedudukan. Dengan kekuasaannya itu Soekarno mampu menguasai pemerintahan dan melemahkan parpol-parpol. Soekarno mampu mengadakan sanksi bagi pihak-pihak yang tidak mengikuti perintahnya. Sebagai Kepala Negara dan Kepala pemerintahan, Soekarno memiliki otoritas untuk memimpin negara Indonesia. Namun, kepemimpinan Soekarno dianggap melebihi batas karena menentang UUD 1945. Kediktatoran yang melekat pada Presiden Soekarno membuatnya melakukan *abuse of power* atau penyalahgunaan kekuasaan. Tidak adanya kekuatan yang mampu mengimbangi Soekarno akhirnya membuat keadaan pemerintahan menjadi timpang. Bahkan dalam demokrasi terpimpin yang disebut sebagai sistem presidensial pun menjadi tidak sesuai. Dalam praktiknya, keadaan eksekutif dan legislatif menjadi timpang karena kewenangan presiden melebihi kapasitasnya. Legislatif sebagai lembaga yang mengawasi eksekutif pun kehilangan perannya karena keberadaan legislatif tidak lebih hanya sebagai instrumen Presiden untuk melancarkan segala pemikiran-pemikirannya.

#### **D. KESIMPULAN**

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Soekarno melakukan penyimpangan kekuasaan pada masa demokrasi terpimpin bukan secara instan, namun merupakan buah pemikirannya sejak muda dan demokrasi terpimpin memberikan kesempatan bagi Soekarno untuk melakukannya. Meskipun menuai banyak kritik dan perlawanan hingga puncaknya adalah Gerakan 30S/PKI, namun Bung Karno tetap menjadi pahlawan revolusioner yang tidak dapat digantikan perannya oleh siapapun. Perjuangannya yang besar dan tulus untuk rakyat Indonesia telah membawa Indonesia menuju kemerdekaan dan dapat disejajarkan dengan bangsa-bangsa lain. Soekarno menjadi pemimpin yang bahkan disegani oleh Barat. Ia menjadi salah satu macan Asia yang pemikirannya selalu menarik untuk dipelajari lebih dalam.

#### **REFERENSI**

Andrew Heywood. (2002). *Politics Second Edition*.

- Budiardjo, M. (1991). *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa*. Pustaka Sinar Harapan.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik (Edisi Revi)*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dahm, B. (Terj. H. B. (1987). *Soekarno dan Perjuangan Kemerdekaan*. LP3ES.
- Gaffar, A. (2006). *Politik Indonesia: Transisi menuju Demokrasi*. Pustaka Pelajar.
- Herbert Feith, C. L. (1995). *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965 (C. L. Herbert Feith (ed.))*. LP3ES.
- Sedana Arta, K. (2022). *Politik Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1966*.  
Candra Sangkala, 4(1), 1–9.  
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JCS/article/view/50222>
- Suganda, H. (2015). *Jejak Soekarno di Bandung (1921-1934)*. Kompas.
- Thoha, M. (2014). *Birokrasi dan Dinamika Kekuasaan*. Prenamedia Group.
- Tumakaka, J. K. (1998). *Peraalihan Kekuasaan Soekarno Soeharto Habibie. Hasta Mitra*.